

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS
TINGKAT SMP NEGERI DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (SI) Di
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



ARY SANDI PARAMYTA

NIM/BP: 1306053/2013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

ABSTRACT

Ary Sandi Paramyta 1306053 : The Implication of Free Education Policy of Public Junior High School Level in Padang City.

The purposes of this research are to find out the implication of free education policy of public junior high school level and efforts are made to improve the implications. The type of this research is qualitative descriptive research. The informants of this research are determined based on certain characteristics in accordance with research purposes. Data type consists of primary data and secondary data. Data were collected through observation, interview, and documentation. Data collection tools were interview guides, observation guides, and field notes. The test of data validity is done through triangulation of sources. The data is analyzed through data collection phase, data reduction, data testing, and withdrawal of conclusions. The results of this research indicate that the free education policy of public junior high school level in Padang city cause implications in many ways. Although on one side this policy is very helpful, it has implications for the quality and education service because all operations must be borne by the central and regional governments. Then, schools are also obliged to improve the quality of education services that exist on their school. However, the constraints on the budget are very crisis happened to this junior high school. The efforts which can be done to improve this implication are the school initiatives to overcome independently the implications of this policy. Thus, it can be concluded that the policy of free education at public junior high school level in Padang city has implications on various matters. Therefore, the government is expected to pay more attention to the availability of budget and other supporting aspects related to the policy. Because the quality of city education is accounted for the implementation of this free education policy.

Keywords: Free Education Policy, Implications, Public Junior High School in Padang City.

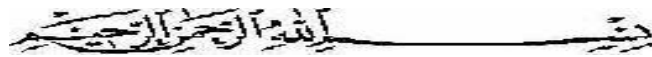
ABSTRAK

Ary Sandi Paramyta 1306053 : Implikasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat SMP Negeri di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implikasi kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri ini dan apa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki implikasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ditentukan berdasarkan pada karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, panduan observasi, dan catatan lapangan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang ini menimbulkan implikasi di berbagai hal. Walau di satu sisi kebijakan ini sangat membantu, namun berimplikasi pada mutu dan pelayanan pendidikan karena seluruh operasional harus ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah. Serta sekolah juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang ada di sekolah mereka. Namun, kendala anggaran sangat krisis terjadi dalam sekolah menengah pertama ini. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki implikasi ini adalah inisiatif dari pihak sekolah untuk dapat menanggulangi secara mandiri implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang menimbulkan implikasi di berbagai hal. Untuk itu Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan ketersediaan anggaran dan aspek-aspek pendukung lain yang terkait dengan kebijakan. Karena mutu pendidikan Kota dipertanggungjawabkan atas terselenggaranya kebijakan pendidikan gratis ini.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan Gratis, Implikasi, SMP Negeri Kota Padang*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Syalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada figur panutan umat manusia Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“Implikasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat SMP Di Kota Padang”** disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, koreksi dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Hasrul, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan hingga selesainya Penyusunan Skripsi ini.

3. Bapak Drs. Suryanef, M.Si, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi M.Pd dan Ibu Alia Azmi, S.IP,
M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Aina, M.Pd sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Sosial Politik FISUNP yang telah memberikan bantuan, dorongan, petunjuk dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dekan FISUNP yang memberikan izin penelitian dan kemudahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar karyawan-karyawanati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam urusan perkuliahan dan pengurusan surat penelitian.
8. Seluruh informan dalam penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kesempatannya memberikan waktu kepada penulis terkait Skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayah Maiyuddin dan Ibu Datercinta Arif Yulihartati, beserta kedua Adik kandungku, Wulan Rahma Yulita dan Rhafael Aria Tama Serta keluarga besar lainnya yang telah membantu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik.
10. Keluarga Besar Civics 2013 Rekan-rekan satu perjuangan Tahun Masuk 2013 di Kost Pondok Suriyang

telah memberikan dukungan, kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Khusus pada sahabat saya dan paterkecuali, Muhammad Ikhsan Ferda, Wilma Welandi, Mutiara Tedy Pratiwi, Nindy Dwi Gusti serta sahabat seperjuangan saya Vanny Mardhatillah, Harmelisa Dianasari, Sandra Dwi Lanovadan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin.

Padang, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. IdentifikasiMasalah	6
C. BatasanMasalah.....	6
D. RumusanMasalah	6
E. TujuanPenelitian	7
F. ManfaatPenelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. KajianTeoritis.....	8
1. KebijakanPendidikan	8
2. Pengertian Implikasi.....	18
B. KerangkaKonseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. JenisPenelitian.....	21
B. LokasiPenelitian.....	22
C. InformanPenelitian	22
D. JenisdanSumber Data	24
1. Jenis Data	24
2. Sumber Data.....	25
3. TeknikPengumpulan Data.....	25
E. UjiKeabsahan Data.....	26
F. TeknikAnalisis Data.....	28
1. Pengumpulan Data	29

2. Reduksi Data	29
3. Penyajian Data	30
4. PenarikanKesimpulan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Temuan Umum.....	31
1. Profil SMP N 1Padang	31
2. Profil SMP N 16 Padang	32
3. Prosil SMP N 34 Padang	33
B. TemuanKhusus.....	34
1. ImplikasiKebijakanPendidikan Gratis Tingkat SMP Negeri di Kota Padang	37
2. LangkahAlternatif yang DitempuhuntukMemperbaikiImplikasiKebijakanPendidikan Gratis Tingkat SMP Negeri di Kota Padang	54
C. Pembahasan	63
1. ImplikasiKebijakanPendidikan Gratis Tingkat SMP Negeri di Kota Padang	63
2. LangkahAlternatif Yang ditempuhUntukMemperbaikiImplikasiKebijakanPendidikan Gratis Tingkat SMP di Kota Padang.....	66
BAB VPENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	23
Tabel 4.1 Data SMP N 1 Padang	31
Tabel 4.2 Data SMP N 16 Padang	32
Tabel 4.3 Data SMP N 34 Padang	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 4.1 Rincian Penggunaan Dana BOS SMP N 34 Padang	39
Gambar 4.2 Keadaan Kelas	47
Gambar 4.3 Fasilitas Olahraga	48
Gambar 4.4 Proses Pembangunan Kelas Baru	49
Gambar 4.5 Tumpukan Material	50
Gambar 4.6 Bangunan Kelas Baru	51

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Surat Izin Observasi

Surat Rekomendasi Kesbangpol

Surat Izin Penelitian dari Fakultas

Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan

Surat Keterangan Selesai Meneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang semakin moderen ini seakan menuntut kita sebagai bangsa yang sedang berkembang untuk dapat meningkatkan sumber daya manusianya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia agar bisa maju dan bersaing di dunia global. Hal ini bisa diperoleh dengan memiliki pendidikan yang baik, bermutu serta berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pelayanan pendidikannya.

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai motivasi dan mampu untuk menopang hidupnya secara berkelanjutan. Hal ini penting, apalagi ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya serta ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Bab IV bagian kesatu dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Namun disisi lain tanggung jawab pendidikan tidak semestinya hanya dititik beratkan pada pemerintahan pusat saja. Karna dilihat dari latar belakang negara Indonesia yang disebutkan bahwa lokasi dan kondisi masing masing daerah berbeda-beda. Besarnya Indonesia serta dibagi atas beberapa pulau dan akses jalan yang tidak merata, seakan jadi alasan untuk digalangkan secara nyata sistem otonomi daerah.

Walau pada prakteknya program wajib belajar sembilan tahun merupakan Kebijakan Nasional yang jika dilihat dari perkembangan zaman standar pendidikan sembilan tahun sudah tidak bermutu lagi apabila diangkat kedalam dunia kerja. Karena kualitasnya yang dilihat secara dasar hanya berstandar sekolah menengah pertama. Namun tak lepas dari peran pemerintah yang memegang tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan pendidikan setiap warga negaranya. Peneliti ingin melihat bagaimana kebijakan pendidikan gratis

ini menyebabkan implikasi terhadap pelayanan pendidikan dan sampai dimana kemampuan pemerintah pusat dan daerah mampu menanggung biaya pendidikan warga negaranya dan menjaga pelayanan pendidikan tetap pada kualitasnya.

Sejalan dengan adanya Program Pemerintah kota Padang yang membantu pemerintah pusat dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hingga tingkat SMP sebagai salah satu tindakan awal dalam langkah Pemerintah Kota berperan serta membantu pembiayaan proses pendidikan. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka daerah dituntut agar mampu mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri.

Kebijakan Pemerintah Daerah kota Padang dalam membantu anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini sangat baik dalam hal peningkatan pendidikan anak-anak usia sekolah, sehingga kesenjangan proses pendidikan disebabkan oleh biaya yang tidak cukup dapat dikurangi. Kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di kota Padang ini pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAKO) nomor 4A tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah hingga tingkat SMP oleh Pemerintah kota Padang melalui Dinas Pendidikannya.

Sejalan dengan adanya Program Pemerintah Pusat pada kebijakan wajib belajar 9 Tahun dan Pemerintah Daerah ikut serta membantu dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Hal ini sangat membantu siswa

secara langsung. Baik itu pada walimurid maupun sekolah sendiri. Pada awal kebijakan ini berlangsung dan hingga saat ini pemerintah menggratiskan semua biaya dan pungutan yang dipungut melalui wali murid. Sesuai dengan bunyi Peraturan Walikota Bab II pasal 2 (2) “ Tujuan diberikan BOSDA adalah sebagai pengganti uang pembangunan dan uang komite atau pungutan lainnya yang dipungut kepada orangtua peserta didik atau wali peserta didik”.

Namun pada kenyataannya masih banyak polemik yang terjadi di masyarakat dan di sekolah pada kebijakan pendidikan gratis ini. Dari observasi yang peneliti lakukan pada SMP N 34 Padang dapat peneliti jelaskan bagaimana implikasi kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP ini dirasakan oleh siswa. Dimana mereka tidak dapat merasakan fasilitas yang cukup memadai, seperti ruang kelas yang hanya menyediakan satu kipas angin saja dan fasilitas olahraga yang belum lengkap yang tentu saja hal ini mempengaruhi kenyamanan dalam proses belajar.

Serta observasi yang juga peneliti lakukan pada SMP N 1 Padang, salah satu dari siswa SMP N 1 Padang menyatakan bahwa siswa tersebut sangat mengharapkan diadakannya kembali kelas akselerasi, yang pada kenyataannya kelas akselerasi terpaksa ditiadakan karena tidak ada anggaran khusus untuk kelas tersebut.

Dengan beberapa fasilitas yang mulai tidak terpenuhi kepada siswa, diduga akibat minimnya dana yang tersedia. Hal ini disebabkan karena tidak diberlakukan lagi uang komite di sekolah. Padahal uang komite sangat berpengaruh pada proses pembangunan yang ada di sekolah, seperti halnya pembangunan fasilitas olahraga, pengembangan pustaka, serta beberapa kegiatan ekstrakurikuler pun harus dikurangi dikarenakan uang komite ditiadakan serta penggantinya pun dirasa tidak mencukupi untuk menutupi anggaran yang diperlukan diatas.

Dengan munculnya kebijakan ini peneliti ingin mengungkapkan apakah Kebijakan Pendidikan Gratis tingkat SMP ini berimplikasi pada pelayanan pendidikan. Oleh karena itu melihat dari perkembangan pendidikan saat sekarang ini, dengan sekian banyak polemik yang beredar di masyarakat serta beberapa kekecewaan beberapa murid maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan ini membawa implikasi terhadap pelayanan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti memandang perlu mengkaji lebih lanjut implikasi yang ditimbulkan oleh Kebijakan Pendidikan Gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang, sehingga mendorong peneliti memilih judul : “IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT SMP NEGERI DIKOTA PADANG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah Implikasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat SMP Negeri di Kota Padang, adalah sebagai berikut :

1. Tidak berkembangnya pelayanan sekolah setelah biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah.
2. Kurangnya fasilitas yang memadai karena minimnya dana yang tersedia.
3. Kurangnya inovasi sekolah setelah biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahannya dapat dibatasi pada Implikasi kebijakan pendidikan gratis *Sekolah Menengah Pertama Negeri* di kota Padang saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang?
2. Langkah alternatif apakah yang ditempuh untuk memperbaiki implikasi kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui langkah alternatif yang ditempuh untuk memperbaiki implikasi kebijakan pendidikan gratis tingkat SMP Negeri di Kota Padang .

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah :

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah kebutuhan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang kebijakan pendidikan gratis, sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep mengenai kebijakan pendidikan gratis.
2. Secara praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kota Padang agar daerah tersebut kedepanya lebih baik dan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.